KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Cegah Penyimpangan Dana: DPR Minta Perkuat Pendamping Desa
Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Cegah Penyimpangan Dana

DPR Minta Perkuat Pendamping Desa

KOMISI V DPR mendorong penguatan peran pendamping desa sebagai upaya pencegahan penyimpangan Dana Desa. Langkah ini penting untuk memastikan setiap dana yang digelontorkan pemerintah bisa dirasakan masyarakat di pedesaan.

"Komisi V DPR meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) terus melakukan bimbingan kepada pemerintah desa. Peran pendamping desa sangat strategis meningkatkan keahlian dalam pemanfaatan Dana Desa," kata Wakil Ketua Komisi V Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Syarief mengungkapkan, akumulasi Dana Desa dari tahun 2015 hingga sampai tahun 2020 sebesar Rp 323,32 triliun. Penggunaan Dana Desa yang tepat dapat menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa.

Sementara, anggota Komisi V Hamid Noor Yasin mengingatkan pentingnya mengarahkan program-program pemerintah untuk penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di pedesaan secara masif. Penguatan ini sebagai upaya untuk terus membangkitkan perekonomian warga desa.

Hamid menuturkan, jumlah BUMDes yang direncanakan ditambah oleh pemerintah, patut diapresiasi. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan 1.250 BUMDes. Namun, dia juga meminta pemerintah memperhatikan persoalan yang membelit BUMDes.

"Kita patut mengapresiasi rencana (penambahan BUMDes) tersebut. Namun, kenyataannya selama ini pembentukan BUMDes bukan tanpa masalah. Pada 2019 sebelum pandemi Covid-19 terdapat 2.188 BUMDes yang mangkrak," ujar Hamid.

Hamid menjelaskan, ada 1.670 BUMDes lagi yang berjalan tapi belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi desa.

Kegagalan ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia di pedesaan dan beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes.

Menurutnya, dibutuhkan pengaturan organisasi yang baik, agar pengurus BUMDes dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan optimal. Sementara akses permodalan masih menjadi masalah klasik yang selalu ada.

"Banyak desa ingin maju dengan BUMDes akhirnya gagal karena sulit mengakses permodalan," katanya. ■ KAL